

**PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM
DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor : 558/5000.MK/11/2013**

Pokja Biro Umum pada Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya secara elektronik sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Pekerjaan Pengelolaan Gedung Kantor, Rumah Negara dan Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI TA 2014

Lingkup pekerjaan : Pengelolaan Gedung

Nilai total HPS : Rp 17.043.564.854,- (Tujuh belas milyar empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)

Sumber pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2014

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang terregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan :

- a. Peserta yang belum melakukan registrasi terlebih dahulu wajib registrasi di LPSE Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat, setiap hari kerja pukul 10.00 s.d. 14.30 WIB.
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Gred 5 atau 6 atau 7 pada Subbidang Perawatan Gedung / Bangunan (21301), yang secara hukum masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi berwenang.
- c. Memiliki Surat Ijin Usaha Non Kecil bidang jasa pengelolaan gedung.
- d. Memiliki Surat Ijin Pengerahan Tenaga Kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja yang masih berlaku.
- e. Memiliki Surat Ijin Pengelolaan Jasa Keamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI yang masih berlaku.
- f. Memiliki Sertifikat SMK3 dari Depnaker RI
- g. Telah terdaftar dalam LPSE MKRI.

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE : (lpse.mahkamahkonstitusi.go.id)

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan : Lihat LPSE

5. Dokumen Pengadaan diambil dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi SPSE

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 20 Nopember 2014

Pokja Biro Umum MKRI